

PELAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA APLIKASI EPRA (EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) DI KABUPATEN MINAHASA

Dian Natalia Mamengko
Universitas Negeri Manado
Email: mdianatalia@gmail.com

Abstract

One of the significant changes is the change in the field of government information systems. Technology and information are two things that cannot be separated and greatly affect civilization from time to time. This can be seen from the process of obtaining information that can be obtained quickly, precisely, accurately and efficiently, supported by increasingly sophisticated technological advances. This technological advancement has made many organizations and agencies use computer and network-based technology to help their work because it is effective and efficient. Since the enactment of regional autonomy in Indonesia, local government is a public sector organization that is authorized by the central government to regulate its own government.

Keywords: Budget, State Administration, Reports

Abstrak

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam bidang sistem informasi pemerintah. Teknologi dan informasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat mempengaruhi peradaban dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari proses untuk mendapatkan informasi yang dapat diperoleh secara cepat, tepat, akurat dan efisien dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi ini membuat banyak organisasi dan instansi menggunakan teknologi berbasis komputer dan jaringan untuk membantu pekerjaannya karena bersifat efektif dan efisien. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, maka pemerintah daerah adalah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Kata kunci: Anggaran, Administrasi Negara, Laporan

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu.

Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan di perbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, (Muindro Renyowijoyo 2012:54).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggarannya adalah laporan realisasi anggaran karena anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling utama. Laporan realisasi anggaran disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintahan pada suatu daerah dan harus memberikan pelayanan maksimal bagi kesejahteraan rakyat termasuk pada pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada serta untuk meningkatkan pembangunan daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Melalui penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul. Metode ini peneliti anggap baik dan dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan tentang Pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) di Kabupaten Minahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Minahasa

Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa memiliki luas wilayah sebesar 121,043.31 ha yang terdiri dari 25 kecamatan (RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, 2019).

Batas-batas luar Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Laut Sulawesi, Kota Manado dan Kota Tomohon.
- b. Sebelah Selatan: Laut Maluku dan Kota Tomohon.
- c. Sebelah Barat: Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.
- d. Sebelah Timur: Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon.

Minahasa merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata 591 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 01001'00" - 01029'00" Lintang Utara dan 124034'00" - 125005'00" Bujur Timur. Luas wilayah Minahasa, adalah berupa daratan seluas 1.141,64 km². Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Minahasa terdiri dari:

0 m - 100 m = 8 %

101- 500 m = 16 %

500-1000 m = 76 %

1.001 m keatas = 0 %.

Penduduk Kabupaten Minahasa berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 348.673 jiwa yang terdiri atas 178.018 jiwa penduduk laki-laki dan 170.655 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahunan tahun 2011-2021 sebesar 0,80 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa tahun 2021 mencapai 305 jiwa/km² (BPS:2022)

Berdasarkan isu strategis dan hasil analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2019-2023 yaitu: "Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera"

Keadaan Pemerintahan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya nyata dan bertanggung jawab yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui inventarisasi/pengkajian urusan pemerintahan daerah, mendayagunakan urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan, kelembagaan, aparatur pelaksana, keuangan dan pembiayaan, dan penetapan peraturan daerah sebagai salah satu landasan yuridis pelaksanaan otonomi daerah, termasuk hubungan yang serasi antar daerah.

Birokrasi sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran, program, dan kegiatan di daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam rangka tugas pokok birokrat tersebut, dibutuhkan perwujudan nyata tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Untuk pemberdayaan aparatur daerah, maka citra dan peran pemerintah daerah harus dibenahi berdasarkan tata pemerintahan yang lebih efisien dan efektif agar kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

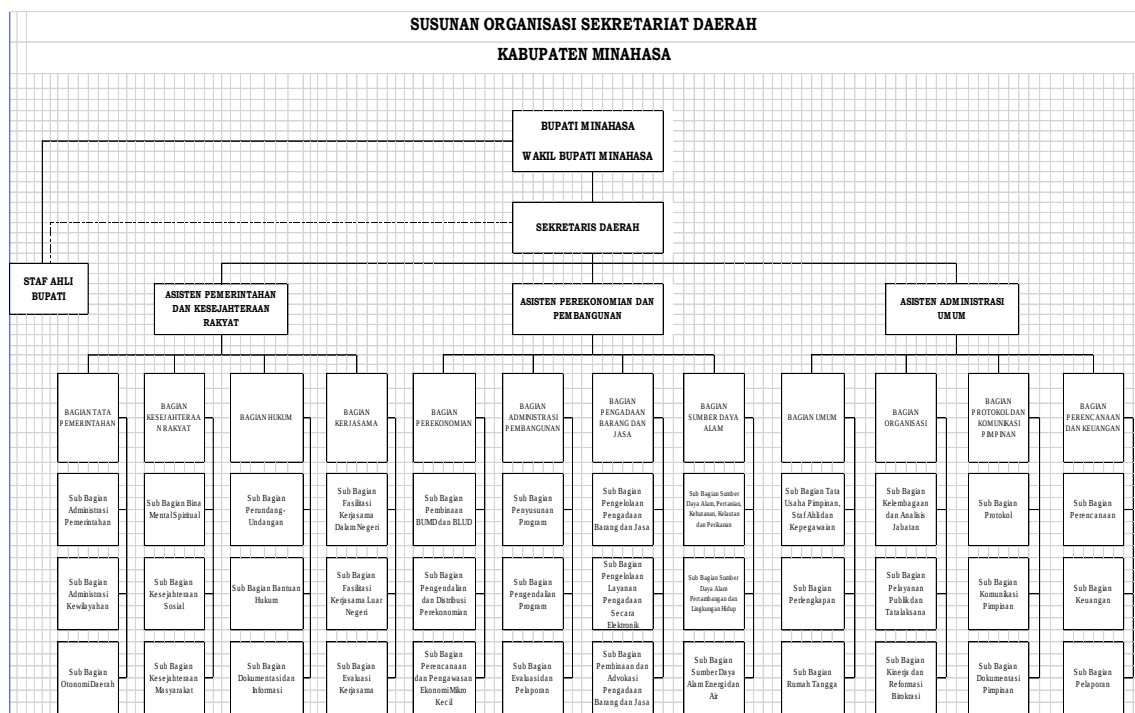
Gambaran Umum Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016, Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa dibentuk. Rincian tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat

Daerah Kabupaten Minahasa diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas yaitu:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambaran Umum Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa adalah unit yang secara langsung mengelola Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) di Kabupaten Minahasa. Dibawah oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2019 Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program,

pengendalian program dan evaluasi pelaporan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi pelaporan.
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan dikepalai seorang Kepala Bagian, tiga orang Kepala Sub Bagian, tiga orang staf dan enam orang THL (Tenaga Harian Lepas). Sebagai pejabat penghubung, dalam mengelola Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan satu orang staf sebagai tenaga admin.

Dalam pelaksanaan dan penjabaran tugas, Bupati Minahasa dibantu oleh sejumlah organisasi perangkat daerah yang diberi nama Perangkat Daerah (PD) memegang peranan masing-masing untuk kesuksesan implementasi program-program yang telah ditetapkan. Dalam fungsi koordinasi, Laporan Realisasi Anggaran semua Perangkat Daerah menjadi wilayah kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini bagian Administrasi Pembangunan khususnya terkait pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran).

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode. Perencanaan dalam penyusunan anggaran sangatlah berperan peran penting dalam mencapai target yang nantinya akan ditetapkan, sebagai gambaran apa yang akan dikerjakan kedepan dalam tahun anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA di Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan mekanismenya, bertujuan untuk memperoleh data realisasi yang valid sesuai anggaran kas dan target yang telah ditetapkan, walau masih ada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan pada Aplikasi EPRA.
- 2) Faktor-faktor pendukung Pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA di Kabupaten Minahasa adalah manfaat Aplikasi EPRA itu sendiri sebagai suatu produk untuk tujuan pengelolaan laporan realisasi anggaran yang memberikan dampak positif

bagi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa dengan kegiatan pelaporan rutin untuk tujuan berjalannya program serta kegiatan dan tercapainya realisasi sesuai rencana anggaran kas dan target yang telah ditetapkan, serta adanya Pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA menunjang kinerja pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem komputerisasi berbasis internet yang bisa dijangkau dari mana saja dan kapan saja.

- 3) Faktor-faktor yang menghambat Pelaporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi EPRA yaitu masih ada Perangkat Daerah yang tidak melaporkan tepat waktu dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya penguasaan sistem informasi aplikasi terkomputerisasi, serta ketersediaan data sebagai bahan laporan pada Aplikasi EPRA yang masih sulit didapat oleh sebagian Operator EPRA.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2003. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2014. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. 2020. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- _____. 2015. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- _____. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
- _____. 2019. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.
- _____. 2022. Keputusan Bupati Minahasa Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Minahasa Tahun 2022
- _____. 2013. Instruksi Bupati Minahasa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Caiden, Gerald E. 1982. *Administration*. Palisades: Palisades Publisher
- Darwin, Muhadjir. 1994. *Teori Organisasi Publik*. Yogyakarta : Magister Administrasi Publik UGM.
- E. Mulyasa. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: : Remaja Rosdakarya Offset.
- European CAF Resource Centre. 2012. *The Common Assesment Framework (CAF)*. Netherland : European Institute of Public Administration.
- Febrian Jack dan Farida Andayani. 2002. *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*. Bandung : Informatika.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harmon, Michael M. dan Mayer Richart T. 1986. *Organization Theory for Public Administration*. Boston : Little, Brown & Co.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____. 2012. *Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herlianto, Didit. 2015. *Anggaran Keuangan Edisi I*. Yogyakarta : Alfabeta.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Kawedar, dkk. 2008. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. Semarang
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- LaQuey Tarcy. 1997. *Sahabat Internet*. Bandung : ITB.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta : UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muindro Renyowijoyo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nigro, Felix A., dan Nigro Lloyd G. 1977. *Modern Public Administration*. New York : Harper & Row Publisher.
- Nurlan Darise. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta : Indeks.
- Ott, J.S.Hyde, A.C dan Shafritz,J. M. 1991. *Public Management : The Essential Reading*. Chicago IL : Lyceum Books/Nelson-Hall Publisher.
- Priansa dan Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran*. Bandung : Afabeta.
- Safroni.2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Yogyakarta : Aditya Media Publishing.
- Shahab Alwi, 1998. *Internet bagi Profesi Kedokteran*. Jakarta : EGC

- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuwono, Sony, et al. 2008. *APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2015. Buku Petunjuk Pengguna GEDi versi 2.0 Pemerintah Kabupaten Minahasa